



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIMA DAHLIA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
3. NHK : 240312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.350.000.000

1. Tanah Seluas 113 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/48 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.500.000

1. MOBIL, CHEVROLET MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
31.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.727.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.891.000.000

Sub Total Rp. 4.451.227.000

III. HUTANG Rp. 353.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.098.227.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.